KEBIJAKAN KOMPLAIN HIJAU: STRATEGI PEMULIHAN LINGKUNGAN BERBASIS *CITIZEN LAWSUIT*

Arini Nur Annisa, Marwati Riza, Ahsan Yunus, Aliya Musyrifah Anas, Irma Idris, Insyirah Fatimah Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, arininurannisa.aa@gmail.com

Abstrak

Masih banyaknya eksploitasi lingkungan saat ini, berdampak pada implikasi penerapan prinsip kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Banyaknya kerusakan lingkungan di Indonesia membutuhkan strategi kebijakan lingkungan pemerintah dan model pengawasan berbasis ecology efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika sistematis pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia, serta menganalisis model kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan kerusakan lingkungan. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian menunjukkan problematika sistematis penegakan hukum lingkungan dipengaruhi efektivitas kelembagaan dibidang lingkungan. Komitmen aparat penegak hukum terkait pemulihan kerusakan lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan lingkungan. Strategi pemerintah dalam memulihkan lingkungan melalui penerapan kebijakan komplain hijau melahirkan beberapa aspek yang dirumuskan melalui recovery dalam pengoptimalan pengaduan masyarakat oleh institusi lingkungan, penerapan media pengaduan lingkungan berbasis citizen lawsuit, dan inspeksi pengelolaan pengaduan lingkungan.

Kata Kunci: Kebijakan, Lingkungan, Masyarakat

Abstract

The large amount of environmental exploitation currently has an impact on the implications of implementing the principles of environmental conservation and sustainability. The large amount of environmental damage in Indonesia requires a government environmental policy strategy and an effective ecology-based monitoring model. This research aims to determine systematic problems in environmental law enforcement in Indonesia, as well as analyze government policy models in efforts to restore environmental damage. The method used is normative legal research with a statutory and case approach. Research shows that the systematic problems of environmental law enforcement are influenced by the effectiveness of institutions in the environmental sector. Commitment of law enforcement officials regarding restoration of environmental damage, availability of adequate facilities and infrastructure, community participation in the form of environmental complaints. The government's strategy to restore the environment through implementing a green complaint policy gave birth to several aspects that were formulated through recovery in optimizing public complaints by environmental institutions, implementing citizen lawsuit-based environmental complaint media, and inspecting environmental complaint management.

Keywords: Policy, Environment, Society

1. Pendahuluan

Pengelolaan negara termasuk didalamnya dalam pengelolaan perekonomian nasional terutama dalam pemanfaatan lingkungan harus bisa memberikan penjaminan hidup kepada masyarakat serta menciptakan kemakmuran yang sesuai

dengan rambu-rambu yang diamanatkan oleh konstitusi.¹ Lebih lanjut, penyelenggaraan perekonomian nasional harus didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berfokus pada penyelenggaraan perekonomian atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan dengan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.

Prinsip berkelanjutan dan keberimbangan dalam amanat konstitusi telah memberikan corak pengelolaan lingkungan yang tidak hanya sekadar pada pemanfaatan melainkan juga pelestarian lingkungan. Dalam menjamin kelestarian lingkungan demi berlangsungnya kehidupan yang baik, pendayagunaan sumber daya alam dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan umum sangat memerlukan keserasian dan keseimbangan pengelolaan lingkungan. Implementasi kebijakan menyeluruh, terpadu, dan memperkirakan dampak kedepannya akan menunjang pembangunan yang berkesinambungan untuk masa kini dan masa mendatang.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berawal dari tahap perencanaan dilanjutkan pada pemanfaatan dan disertai dengan upaya pengendalian mutu lingkungan disertai dengan pemeliharaan. Selanjutnya pengawasan dan penegakan hukum sebagai bentuk penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan.²

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) telah menggalakkan rancangan pembangunan yang memusatkan kepada kelestarian lingkungan. *Green Investment* merupakan hasil konsep Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) yang bertujuan sebagai upaya preventif agar peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat laju pertumbuhan penduduk serta pesatnya pembangunan dapat dinetralisir.³ Konsep pembangunan rendah karbon yang telah dikenalkan oleh Bappenas adalah konstitusi pembangunan berkelanjutan yang dalam implementasinya menciptakan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca.⁴

Pelaksanaan program *resource exploitation* hingga hari ini, masih jauh dari prinsip kelestarian dan keberlanjutan. Eksploitasi lingkungan dalam pelaksanaannya tidak konsekuen dengan semangat pelestarian lingkungan yang mengakibatkan degradasi lingkungan, alam, dan hutan sebagai akibat dari deforestasi dan pembangunan yang tidak tersupervisi. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PTKL) KLHK merilis laporan pada periode 2014-2020 sebanyak 117.106 hektar lahan dialihfungsikan menjadi kawasan tambang

---

¹ Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945

² Pasal 4 UU No.32 tahun 2009

³ *Ibid.* Pasal 1 ayat (7) dan (8).

⁴ Bappenas, *Implementasi Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon*, (Kementerian PPN/Bappenas, 27 Agustus 2021) diakses pada 28 September 2022.

melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKHmas).⁵ Sekitar 14.410 hektar atau tidak cukup 10 persen alihfungsi lahan hanya untuk area nontambang untuk fasilitas publik. Fakta ini jelas menunjukkan tidak konsisten dan minimnya komitmen hijau dalam pembangunan.⁶

Tercatat Sekitar 3,2 juta hektar *nature forest* ditemukan dalam Izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan akan terus meningkat jika pengembangan hutan di wilayah *natural forest* dan *peatlands* tidak diberi pengawasan yang tegas. Lebih lanjut dampak dari ekspansi yang tidak berbasis pada lingkungan menunjukkan fakta-fakta yang miris. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), data jumlah desa yang terkena pencemaran lingkungan mencapai 17.826 desa, dan jumlah laporan galian yang tidak ditutup mencapai 3.092 galian. Kerusakan yang terlalu banyak harus dikawal melalui pengawasan yang tepat. Pengawasan melalui media pelaporan KLKH saat ini tidak cukup efisien dan efektif untuk menampung semua laporan dari masyarakat. Tercatat laporan PTSP hanya menerima 1.000 lebih aduan dengan kerusakan yang begitu banyak. Beberapa aturan berkapasitas *ecology* sangat tepat dengan konsep *green economy*. Oleh karena itu, dorongan mengupayakan reformasi dan pembaruan untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawalan terhadap lingkungan melalui inovasi *citizen lawsuit*.

Pengabaian kerusakan lingkungan akan berimbas pada semua aspek kehidupan. Buruknya kondisi ekonomi di masa mendatang dikarenakan tidak dilakukan pertimbangan antara ekonomi dan ekologi. Denda atau ganti rugi bagi perusak lingkungan sebagai konsekuensi sanksi tak cukup menggantikan kerugian masyarakat. Mekanisme penegakan hukum dibidang lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan strategi kebijakan yang ideal. Pemberian perizinan yang tidak disertai dengan mekanisme pengawasan lebih lanjut akan berdampak pada kondisi ekologi. Keterlibatan maksimal masyarakat secara masif menjadi hal penting. Persoalan yang hingga hari ini berlangsung adalah model pemberian izin dan model pengawasan yang digunakan sangat tidak berbasis pada ekologi.

Penelitian mengenai penegakan hukum lingkungan oleh Farah & Fatma menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidana yang dipengaruhi oleh sarana hukum yang kurang memadai.⁷ Penelitian lebih lanjut oleh Tarya Sonjaya, dkk menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan belum dapat

---

⁵ Ilham, *Bantahan Keras KLHK Soal Tudingan Obral Ijin di Era Jokowi*, (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 22 Januari 2021), <<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5782/bantahan-keras-klhk-soal-tudingan-obral-ijin-di-era-jokowi>> diakses pada 29 September 2022.

⁶ Delly Ferdian, *Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan*, (Kompas Media, 16 November 2021) <<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/16/mewujudkan-pembangunan-ekonomi-tanpa-merusak-lingkungan>> diakses pada 28 September 2022.

⁷ Farah Nur Laily, Fatma Ulfatun Najicha, 2022, *Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia'*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum 17, 26.

berjalan secara maksimal karena tidak ada sinergi yang baik dan hal tersebut dapat dilihat dari munculnya ketidakselarasan pemangku kebijakan.⁸ Penelitian ini belum mengkaji penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dalam strategi ideal kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan kerusakan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika sistemik penegakan hukum lingkungan di Indonesia, serta menganalisis model kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan kerusakan lingkungan.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yang bersumber dari kajian tertulis yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan dan beberapa literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Problematika Sistemik Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Problematika dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah kelembagaan terutama institusi dibidang lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu institusi yang wajib membantu dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terhadap penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.¹⁰

Muatan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 18/MENLHK-II/2015, salah satu fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung berupa pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan

---

⁸ Tarya Sonjaya, dkk. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pembangunan*, Lambung Mangkurat Law Journal 203, 214

⁹ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

¹⁰ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Indonesian Journal of International Law 13.

pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air".¹¹

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 17.826 total jumlah desa yang terkena pencemaran lingkungan. Angka pencemaran paling tinggi ialah pencemaran air dengan total 10.683 kasus, kemudian disusul oleh pencemaran udara berjumlah 5.644 kasus, dan terakhir pencemaran tanah sebanyak 1.499 kasus. Masih banyaknya kasus pencemaran yang ditemukan, menjadi hal yang harus segera dibenahi oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pengawasan tanah dan air.¹²

Permasalahan lingkungan yang berdampak pada pertambangan menjadi sorotan terkait, pada tahun 2020 Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat terdapat sejumlah 3.092 lubang tambang di Indonesia yang tidak dipulihkan, termasuk 814 di antaranya terdapat di Kalimantan Selatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan)/IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100%. Pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010, sanksi administrasi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan atau jaminan pascatambang dan pelaksanaan reklamasi dan atau pascatambang.¹³

Peran institusi dalam penyelesaian permasalahan lingkungan menjadi wadah bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tupoksinya dan partisipasi masyarakat. Selain dari aspek kelembagaan, komitmen aparat penegak hukum dalam persoalan lingkungan menjadi penting. Lemahnya komitmen dari aparat penegak hukum, faktor masih adanya permasalahan lingkungan yang tidak terselesaikan. Kebijakan yang tidak memeriksa sektor-sektor lingkungan, ekonomi, serta kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

Kasus pembatalan izin lingkungan PLTU Cirebon II oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan izin lingkungan baru untuk PT Cirebon Energi Prasarana terhadap pembatalan tersebut. Keputusan penuh pro-kontra seperti ini menjadi preseden yang buruk untuk sistem kelola lingkungan hidup di Indonesia.¹⁴

---

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2021*, Badan Pusat Statistik, diakses pada tanggal 29 September 2022.

¹² *Ibid.*

¹³ Anisatul Umah, *Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data ESDM*, CNBC Indonesia, diakses pada tanggal 24 September 2022.

¹⁴ Olivia Anggie Johar, 2021, *Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 15, No. 1, hlm. 58.

Kebijakan Komplain Hijau : Strategi Pemulihan Lingkungan Berbasis Citizen Lawsuit

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama tahun 2022, telah mencabut 180 IUP dari total 2.078 yang direncanakan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan pencabutan. Alasan pencabutan adalah karena para pemegang IUP tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dimana izinnya telah lama diberikan oleh pemerintah. Akibat dari pencabutan izin tersebut ialah terjadi hambatan pemanfaatan SDA sehingga pembantuan peningkatan kesejahteraan rakyat juga tidak direalisasikan. Sesuai ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, perusahaan tambang dapat diberikan IUP apabila telah memenuhi tahapan persyaratan, mulai dari tahap administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.¹⁵

Pemenuhan syarat-syarat diberikannya IUP bukanlah jaminan perusahaan tambang akan memenuhi regulasi peraturan yang ada, contoh kecil seperti kewajiban penyampaian RKAB yang tidak dijalankan, maka dikhawatirkan akan terjadinya pelanggaran hukum lagi yang nantinya jika tidak dilakukan pengawasan yang ketat hal itu dapat memengaruhi berbagai sektor di masa depan, khususnya memengaruhi kestabilan ekonomi dan juga kelestarian ekologi di Indonesia.

Para penegak hukum yang kurang dalam memberi keadilan kepada masyarakat menandakan kemampuan intelektual atau moral sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Penegakan, pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh lembaga berwenang sangat lamban, dan ketidaksiapan dalam penanganan berbagai macam permasalahan lingkungan. Maraknya kasus korupsi yang memanfaatkan lingkungan adalah akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Perlindungan dan pengelolaan terhadap kualitas lingkungan juga ditunjang oleh sarana dan prasarana. Tugas pemerintah memberi bantuan penyusunan AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang terdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan. Salah satu tugas dan wewenang pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup.¹⁶ Sehingga diperlukan bantuan berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.

Terbatasnya fasilitas dan sarana penunjang termasuk itu dana, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan. Terlebih saat ini, dalam penindakan berbagai macam problematika lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih atau alat laboratorium. Dalam penerapan kepentingan operasionalisasinya diperlukan tenaga ahli dan biaya yang tidak sedikit. Kenyataan menunjukkan masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam membantu proses pengelolaan dan perlindungan

---

¹⁵ Pasal 131 Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁶ Pasal 63 ayat(1) *op.cit* UU No.32 tahun 2009

lingkungan di Indonesia. Permasalahan harus segera dibenahi khususnya dalam hal kebijakan yang seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Upaya penegakan hukum lingkungan melibatkan faktor manusia sebagai wujud partisipasi masyarakat sebagai pelaksananya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri. Peran aktif ikut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya. Peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pengaduan, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan/atau; penyampaian informasi dan/atau laporan.¹⁷

Hak dan kesempatan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat ternyata tidak cukup dalam upaya melindungi lingkungan. Data Statistik Pengaduan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) di tahun 2021 hanya mencatat 1.795 jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi pada sejumlah daerah di Indonesia, yang memuat diantaranya 956 laporan yang telah diterima dan 839 laporan yang telah diselesaikan. Sementara untuk data kerusakan lingkungan di Indonesia tercatat sebanyak lebih dari 10.000 kasus.¹⁸ Terlihat bahwa total laporan masyarakat dengan data permasalahan lingkungan pada tahun 2021 di atas sangat jauh perbandingannya, yang menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk ikut dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih sangatlah rendah.

Berkaitan dengan faktor-faktor kesadaran hukum, yaitu: Pertama, “mengetahui”, adanya keberlakuan regulasi bahwa setelah UU disahkan maka masyarakat dianggap telah mengetahuinya. Realisasi pasca diundangkan ada aktivitas sosialisasi yang tepat dan berlanjut. Jika tidak, maka dapat dihitung hanya segelintir jumlah masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang peraturan tersebut dan jumlahnya dipastikan tidak akan menyentuh masyarakat secara merata. Hal ini berdampak pada pemberitahuan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki atau bahkan tidak mengetahui wajibnya AMDAL. Kedua, “mengerti”, masyarakat tidak cukup jika sekedar mengetahui saja, tetapi juga perlu pemahaman mengenai isi peraturan, seperti apa tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Faktor lain yang membuat masyarakat tidak memaksimalkan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan, karena kurangnya masyarakat yang mengetahui layanan pengaduan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari KLHK sebagai program pelayanan publik secara online. Layanan bagi masyarakat dapat membuat aduan terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya terutama

---

¹⁷ *Ibid.* Pasal 70 ayat (1) dan (2)

¹⁸ Sistem Informasi Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Pengaduan Masyarakat*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 24 September 2022.

masyarakat pedesaan yang kesulitan dalam mendapatkan akses informasi dan jaringan internet yang stabil.

3.2. Kebijakan Komplain Hijau

Dalam mendukung kebijakan penegakan hukum lingkungan modern (*Environment Oriented Law*) menjadi upaya penjaminan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan¹⁹. Strategi ideal pemulihan lingkungan yang dapat diterapkan secara efektif dan bersifat pembaharuan sebagai bentuk kebijakan komplain hijau sebagai implementasi kebijakan sebagai berikut:

3.2.1. Recovery Pengaduan Masyarakat

Pemerintah bertugas dan berwenang dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan hutan, dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan. Pengaduan dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada instansi penanggungjawab terhadap dugaan maupun pelanggaran dibidang lingkungan hidup/kehutanan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan.²⁰ Keberadaan instansi penanggungjawab dalam pengelolaan pengaduan terdiri atas kementerian, instansi lingkungan hidup/kehutanan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan kesatuan pengelolaan hutan.²¹

Setiap Direktorat Jenderal KLHK, masing-masing memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan *recovery* atau pemulihan setiap aktivitas lingkungan. Namun, pembentukan badan atau lembaga di KLHK yang khusus untuk mengawasi, mengontrol, dan melaksanakan kebijakan pemulihan menjadi hal yang dapat dipertimbangkan oleh KLHK sebagai lembaga hijau. Peranan lembaga hijau memiliki fungsi baik secara pencegahan maupun penanggulangan terhadap permasalahan lingkungan dengan pertimbangan negara memiliki kekuatan dan kekuasaan yurisdiksi atau²² wilayah hukumnya untuk melakukan penegakan hukum melalui lembaga-lembaga hukum yang didirikan.

Pengelolaan pengaduan masyarakat seharusnya bersifat sistematis yang sejalan dengan asas transparan, partisipatif, akuntabel, cepat, dan sederhana. Pengelolaan pengaduan integral berupa pengelolaan yang dapat dilaksanakan secara online maupun offline disesuaikan dengan wilayah domisili pengadu. Instansi penanggung jawab dalam mengelola pengaduan yang terdiri dari

---

¹⁹ A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 129.

²⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan No.P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017

²¹ *Ibid.*

²² Singgih Samsuri, 2019, 'Tata Kelola Pengaduan Pelayanan Publik', <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--tata-kelola-pengaduan-pelayanan-publik> Diakses pada 1 Agustus 2023

kementerian, instansi lingkungan hidup/kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta kesatuan pengelolaan hutan sesuai dengan kewenangannya.²³ Pengelolaan pengaduan harus bersifat sinkronisasi data yang dapat diakses oleh semua instansi sehingga terdapat keterbukaan informasi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat.

Pengelolaan pengaduan masyarakat bersifat akuntabel dapat diwujudkan dengan melakukan pengelompokan pengaduan berdasarkan skala wilayah/cakupan proyek eksploitasi lingkungan. Adapun pengelompokannya dibedakan menjadi skala regional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar pengaduan masyarakat dapat tersistematis sehingga proses pengelolaan pengaduan oleh instansi terkait dapat berjalan maksimal, tanpa adanya tumpang tindih kewenangan.

3.2.2. Media Pengaduan yang Berbasis *Citizen Lawsuit*.

Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa pemberian saran, pendapat, usul, keberatan maupun pengaduan pelayanan. Berbagai pelayanan publik yang tidak sejalan standar pelayanan dapat dilakukan pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk kontrol atau pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Salah satu model untuk pengaduan masyarakat melalui program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh instansi penanggungjawab yang memberikan layanan publik berupa aduan mengenai hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Layanan publik ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan jika terdapat permasalahan lingkungan yang mereka temukan di wilayah sekitar.

Model pengaduan ini dilakukan dengan pengisian formulir online melalui *website* atau dapat melalui pengiriman chat. Tahapan untuk melakukan aduan lewat *website* sudah cukup sistematis dengan melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu, kemudian pengisian formulir pengaduan yang berisikan identitas pelapor, identitas terlapor, dan detail pengaduan. Data kelengkapan informasi dapat diperoleh dari pihak pelapor atau pihak terlapor sehingga dalam diterima dan diprosesnya laporan tersebut akan lebih cepat.

Salah satu hal penting yang perlu dibahas juga pada layanan ini berkaitan dengan objek pengaduan dan adanya opsi tipologi kasus yang akan dilaporkan, masyarakat tidak hanya dapat melaporkan kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan, melainkan juga dapat melaporkan terkait pelanggaran izin lingkungan. Penerapan media complain yang berbasis *Citizen Lawsuit*, atau masyarakat yang ikut

---

²³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan No.P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017, *op.cit.* Pasal 6

serta mengambil peran dalam menggugat dan melaporkan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengelolaan dan eksploitasi lingkungan hidup.

Pengawasan tidak hanya melalui *website*, masyarakat sekarang lebih condong ke penggunaan aplikasi karena lebih efisien, maka perlunya pembaharuan fitur, tampilan, serta informasi pada aplikasi difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fitur “pengaduan” yang disediakan pada aplikasi tersebut hanyalah berupa link yang nantinya akan mengalihkan pengunjung ke laman *website* PTSP. Fitur pengaduan seharusnya dapat lebih maksimal lagi pengoperasiannya di aplikasi tersebut, mengingat tampilan sederhana pada aplikasi terlihat lebih mudah dipahami cara penggunaannya, dibandingkan tampilan *website* yang terlihat lebih kompleks. Pengembangan aplikasi ini dapat mempermudah proses pelayanan pengaduan masyarakat dan respon cepat dari pemerintah dengan tetap menjamin perlindungan bagi pengadu.

3.2.3. Inspeksi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Transparansi pengawasan masyarakat dalam pengelolaan pengaduan dapat dilakukan melalui perkembangan atas status pengelolaan pengaduan yang diakses secara luring daring, adanya laporan hasil pengaduan sebagai bukti legalitas, dan upaya maupun tindak lanjut dari hasil pengaduan yang berdampak pada upaya penegakan hukum lingkungan. Inspeksi pengelolaan pengaduan ini merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat terkait perkembangan pengelolaan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan perwujudan dari asas transparan.

Pemerintah dalam hal ini menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan. Pengawasan yang dilakukan bersifat teknis baik berupa pemantauan, keterangan, dan pemeriksaan peralatan, serta instalasi bagi para pelaku usaha/kegiatan.²⁴ Pengawasan teknis yang intensif dapat meminimalisir pelanggaran perizinan lingkungan.

Sebagaimana dalam ketentuan PP RI No. 22 Tahun 2021 pelaku usaha harus terlebih dahulu memenuhi prasyarat sebelum dikeluarkannya Perizinan Berusaha. Prasyarat tersebut berupa Persetujuan Lingkungan, yang dimulai dari tahapan penyusunan dan pengujian kelayakan Amdal, kemudian penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.²⁵ Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan yang memiliki beberapa tahapan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.²⁶ Pemberian efek jera bagi pelanggaran terhadap lingkungan seharusnya dapat

---

²⁴ Pasal 74 *op.cit* UU No.32 tahun 2009

²⁵ Pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁶ Pasal 76 *op.cit* UU No.32 tahun 2009

dilakukan secara paksaan pemerintah yang sifatnya dapat menghambat sementara proses kegiatan produksi hingga pencabutan izin yang menyebabkan kegiatan produksi terhenti. Penjatuhan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran lingkungan sebagai bagian dari pemulihan lingkungan.

5. Kesimpulan

Problematika sistematis penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni, efektivitas kelembagaan terutama institusi dibidang lingkungan, komitmen aparat penegak hukum terkait pemulihan kerusakan lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan terkait permasalahan lingkungan. Strategi ideal pemulihan lingkungan yang dapat diterapkan secara efektif dan bersifat pembaharuan melalui kebijakan komplain hijau berupa *recovery* pengaduan masyarakat yang bersifat integral, penerapan media *complain* berbasis *citizen lawsuit* melalui partisipasi masyarakat ikut serta mengambil peran dalam menggugat dan melaporkan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengelolaan dan eksploitasi lingkungan hidup. dan inspeksi pengelolaan pengaduan sebagai bentuk keterbukaan informasi masyarakat.

6. Referensi

- A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Anisatul Umah, *Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data ESDM*, CNBC Indonesia, diakses pada tanggal 24 September 2022.
- Badan Pusat Statistik, *Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Desa), 2014-2021*, Badan Pusat Statistik, diakses pada tanggal 29 September 2022.
- Bappenas, *Implementasi Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon*, Kementerian PPN/Bappenas, diakses pada tanggal 28 September 2022.
- Delly Ferdian, *Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan*, Kompas Media, diakses pada tanggal 28 September 2022.
- Farah Nur Laily, Fatma Ulfatun Najicha, 2022, *Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum
- Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development :Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Indonesian Journal of International Law 13
- Ilham, *Bantahan Keras KLHK Soal Tudingan Obral Ijin di Era Jokowi*, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, diakses pada tanggal 29 September 2022.

Kebijakan Komplain Hijau : Strategi Pemulihan Lingkungan Berbasis Citizen Lawsuit

Olivia Anggie Johar, 2021, *Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Lingkungan Vol. 15, No. 1.

Tarya Sonjaya, dkk. 2020, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pembangunan*, Lambung Mangkurat Law Journal.

Singgih Samsuri, 2019, *Tata Kelola Pengaduan Pelayanan Publik* <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--tata-kelola-pengaduan-pelayanan-publik> Diakses pada 1 Agustus 2023

Sistem Informasi Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Pengaduan Masyarakat*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, diakses pada tanggal 24 September 2022.

Soejono, H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan No.P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/ Perusakan Lingkungan Hidup dan/Perusakan Hutan